

KINERJA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENGELOLAAN E-CATALOGUE DI PROVINSI DKI JAKARTA

Nathaniel Lewi Hastar

NPP. 31.0340

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: 31.0340@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dra.Hj. Riza Risyanti, M.Si

ABSTRACT

Problem statement/Background (GAP) : *Electronic Catalog or E-Catalogue is managed by UKPBJ to simplify the process of procuring government goods/services. In this case, the UKPBJ in DKI Jakarta Province which carries out the management of the E-Catalogue is the Goods/Services Procurement Service Agency. Purposes* : *This research aims to analyze the performance of Goods/Services Procurement Service Agencies in E-Catalogue Management in DKI Jakarta Province. Method* : *The research method used is a qualitative research method. Research data was collected through interviews with employees responsible for implementing electronic catalog management, observations by visiting locations and directly observing work related to E- catalogue management and also by taking documentation connected to E- Catalogue management. Result* : *This research shows that BPPBJ's performance in managing the DKI Jakarta E-Catalogue is not good enough yet and requires several improvements related to existing obstacles such as insufficient personnel commitment, inadequate employee formation, many violations by business actors and a payment system that is difficult to accept. Conclusion* : *Therefore, improvements are needed, especially regarding the quality and number of personnel, as well as the system on the E-catalogue platform which should've guarantees security and cash flow for both parties*

Keywords : *Performances, E-Catalogue, Management, Procurement*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP) : *Katalog Elektronik atau E-Catalogue dikelola oleh UKPBJ untuk mempermudah Proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini UKPBJ di Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan pengelolaan E- Catalogue ialah Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Tujuan* : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan E-Catalogue di Provinsi DKI Jakarta. Metode* : *Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif . Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan para pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan katalog elektronik, Observasi dengan mendatangi lokasi dan mengamati langsung pekerjaan terkait pengelolaan E-catalogue serta melakukan dokumentasi terkait pengelolaan E-Catalogue. Hasil / Temuan* : *Penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja BPPBJ dalam mengelola E-Catalogue DKI Jakarta belum cukup baik serta memerlukan beberapa pembenahan terkait kendala yang ada seperti komitmen personel yang masih kurang,*

Formasi pegawai yang tidak terpenuhi, banyaknya pelanggaran oleh pelaku usaha hingga sistem pembayaran yang sulit diterima. **Kesimpulan** : Oleh karena itu diperlukan pembenahan terutama di terkait kualitas dan jumlah personil sistem transaksi di *platform E-catalogue* yang seharusnya menjamin keamanan dan *Cashflow* bagi kedua belah pihak

Kata Kunci : Kinerja, *E-Catalogue*, Pengelolaan, Pengadaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan barang&jasa adalah suatu kegiatan pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang & jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. pengadaan barang dan jasa termasuk dalam pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik meliputi layanan kebutuhan birokrasi pemerintahan. Prosedur pengadaan barang dan jasa di seluruh provinsi DKI Jakarta sudah berbasis elektronik, baik untuk pengadaan secara tender maupun melalui *e-purchasing* yang dilaksanakan dalam *platform E-Catalogue*. Dalam pelaksanaannya, tetap terdapat kekurangan yang memungkinkan pelaku usaha melakukan kecurangan. Contohnya seperti kasus korupsi Bansos Dinas Sosial DKI Jakarta senilai 3,65 Triliun Rupiah dan Kasus UPT Alkal Dinas Bina Marga DKI Jakarta senilai 36,1 Miliar Rupiah.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberi kontribusi bagi perekonomian. Melihat dari pokok rumusan masalah yang ada, seperti celah kecurangan hingga tindak korupsi yang terjadi dalam proses pengadaan Barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, hal ini menunjukkan sistem pengadaan melalui katalog elektronik (E-Purchasing) masih bermasalah dan perlu diadakan penelitian terkait Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan E-Catalogue di Provinsi DKI Jakarta

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dan acuan antara lain seperti Deby Ariesta (2021), Jurnal yang berjudul “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *E- Catalogue* Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”, penelitian ini menggunakan teori efektifitas Gibson (2005) dan meneliti seputar pemanfaatan E-Catalogue dalam pengadaan logistik untuk kegiatan dan program kerja kecamatan Kebayoran Lama. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas *E-Catalogue* di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2019 berjalan efektif namun belum optimal dalam penerapannya. Selain itu, Muhammad Iqbal (2020) dengan jurnal berjudul “Pengaruh Pelaksanaan *e-Catalogue* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm” dimana hasil penelitiannya Mendeskripsikan dan menggambarkan pemanfaatan *E- catalogue* yang memengaruhi sektor ukm & umkm secara signifikan terutama dalam peningkatan laba dan perluasan pasaran produk umkm. Kemudian dalam Nurlia (2017) dengan judul penelitian ”Analisis Sistem Dan

Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Pln (Persero) Area Makassar Utara” penelitian ini menitikberatkan sistem pengadaan barang/jasa di PT PLN yang mayoritas masih menggunakan tender dan tak tercantum di LPSE sehingga masih berpotensi besar bagi oknum tak bertanggungjawab untuk melakukan kecurangan, hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan E-Procurement di PT PLN masih belum terlaksana dengan maksimal.

Selain itu, Fitri Diani dan Fauzi Arif Lubis (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah” melakukan penelitian yang menyoroti penurunan pendapatan yang signifikan pada UMKM di Kota Medan pasca pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teori peran dimana hasil penelitian ini menitikberatkan peran pemerintah untuk memberdayakan UMKM di Kota Medan untuk mendaftar sebagai penyedia di Platform E-Catalogue sehingga pasaran produk mereka lebih luas dan diharapkan pendapatan UMKM tersebut akan mengalami peningkatan. Kemudian Andryani Ningsih dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat” Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan metode survei cross sectional berupa data kuantitatif. Data diambil secara kuantitatif dengan cara pembagian kuesioner pada responden. Penelitian ini menggunakan responden bagian pengadaan berupa populasi sebanyak 21 orang yang tersebar di 4 RSUD, yaitu RSUD Bantul, RSUD Sleman, RSUD Wates, dan RSUD Kota Jogja. Proses penerapan *e-purchasing* memiliki hubungan dengan efisiensi pengadaan obat, yakni variabel persiapan, pelaksanaan dan manfaat kendala dengan nilai signifikansi (p) 0,001, 0,024 dan 0,007 dengan koefisien korelasi (r) tertinggi adalah variabel persiapan yakni 0,690 yang mengasumsikan bahwa hubungan antara persiapan secara *e-purchasing* dengan efisiensi sangat kuat.

Selanjutnya ialah penelitian Ade Haidir dan Budi Ilham Maliki (2024) dalam jurnalnya yang berjudul Penerapan Kebijakan E-Purchasing dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan *e-Purchasing* terhadap eksistensi Pokja Pemilihan. Hasil penelitian menyimpulkan Penerapan metode *e-purchasing* dalam pengadaan barang dan jasa pada organisasi pemerintah membawa transformasi teknologi yang signifikan. Hal ini melibatkan perubahan paradigma, eliminasi birokrasi, penyederhanaan prosedur, dan peningkatan efisiensi sumber daya. Selain itu, penelitian Ali Zakariya dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui *e-Purchasing*” hasil penelitian ini menunjukkan Perubahan sistem pengadaan dari semula sistem lelang menjadi sistem *e-purchasing* mengakibatkan penyederhanaan business process pengadaan jembatan gantung pejalan kaki. Sebelumnya dilakukan proses lelang melalui UKPBJ yang membutuhkan durasi hingga lebih dari 1 bulan dari mulai persiapan hingga penyampaian hasil pemenang lelang.

Kemudian, penelitian Agus Arif Rakhman (2023) dalam jurnal berjudul “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa” Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta implementasi dan evaluasi SOP tersebut. Penelitian Asep Indra Gumilar dkk (2023) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat” Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan anggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten

Bandung Barat dalam mendukung PDN dilaksanakan melalui berbagai komitmen regulasi. Regulasi tersebut menjadi acuan bagi paraPA dan PPK dalam pelaksanaan barang/jasa. Penelitian Darmawan dkk (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara, Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia” penelitian ini menyimpulkan Terdapat pengaruh nilai kontrak pada RUP yang sangat besar terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Jumlah paket pengumuman pengadaan pada RUP lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan dari pada nilai kontrak yang dianggarkannya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini membahas Kinerja Bada Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola katalog elektronik. Penelitian ini merupakan suatu kebaruan karena belum pernah ada yang meneliti katalog elektronik lokal DKI Jakarta langsung di Badan Pengelolanya serta belum pernah ada yang meneliti katalog elektronik dari sisi pengelolaannya dimana kebanyakan penelitian meneliti katalog elektronik dari segi pemanfaatannya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Kinerja Armstrong & Baron sebagai pisau analisisnya

1.5 Tujuan

Sigit hermawan (2016 : 1) menjelaskan bahwa tujuan umum dari metode ilmiah adalah menjelaskan, meprediksi dan mengontrol fenomena - fenomena dalam kehidupan sosial dan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode dan prosedur yang sistematis dalam memecahkan setiap persoalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta dalam mengelola pasar barang dan jasa pemerintah dalam katalog elektronik (*E-Marketplace*) lokal DKI Jakarta

II. METODE

Lexy J. Moleong (2014 :39) menjelaskan “Penelitian itu pada dasarnya merupakan upaya untuk menemukan teori, dan hal itu dilakukan secara baik justru dengan pendekatan induktif. Data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori - teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.”

Teknik pengumpulan data yang digunakan seperti menurut Simangunsong (2017:81) yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ialah 7 orang dan dianalisis berdasarkan teori kinerja Armstrong & Baron dengan 3 dimensi. Sugiyono (2012 : 137) mengemukakan bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi yaitu di kantor BPPBJ DKI Jakarta di Gedung Balaikota DKI Jakarta Blok H lantai 11.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN


3.1 Kinerja BPPBJ Dalam Pengelolaan E-Catalogue di Provinsi DK Jakarta

Penelitian ini mengacu pada teori kinerja oleh Armstrong & Baron dalam Wibowo (2014) guna menganalisis Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa DKI Jakarta dalam mengelola *E-Catalogue* yang terbagi melalui 3 (tiga) dimensi yaitu :

- 1) Faktor Personil
- 2) Faktor Tim
- 3) Faktor Sistem Kerja Organisasi

3.1.1 Faktor Personil

Salah satu penentu baik tidaknya kinerja suatu organisasi adalah personil dalam organisasi tersebut. 2 hal yang setidaknya harus dimiliki oleh personil organisasi yaitu komitmen dan kompetensi. 2 hal ini sangat berpengaruh pada kinerja individu yang tentunya akan memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini personil BPPBJ dituntut berkomitmen dalam pelaksanaan tugasnya dan harus memiliki kompetensi yang baik terutama dalam penguasaan teknologi dan seputar pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi, peneliti menemukan bahwa terdapat pelaku usaha yang terdaftar ternyata merupakan pelaku usaha yang punya riwayat menyalahi peraturan pengadaan, hal ini tentunya seharusnya tidak terjadi karena berpotensi merugikan instansi pemerintah yang akan melakukan pengadaan melalui *E-Purchasing*.



JAS HUJAN
3626000008-APR-189466957
PT. FARID MITRA UTAMA | Katalog Lokal
Alat Pelindung Diri Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Perlengkapannya

Rp 300.000,00
Wilayah DKI Jakarta
Stok Produk : 1000
Pilih Lokasi untuk melihat Harga: DKI Jakarta

Informasi Penyedia | Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang | **Riwayat Pelanggaran** | Rating Penyedia | KBLI

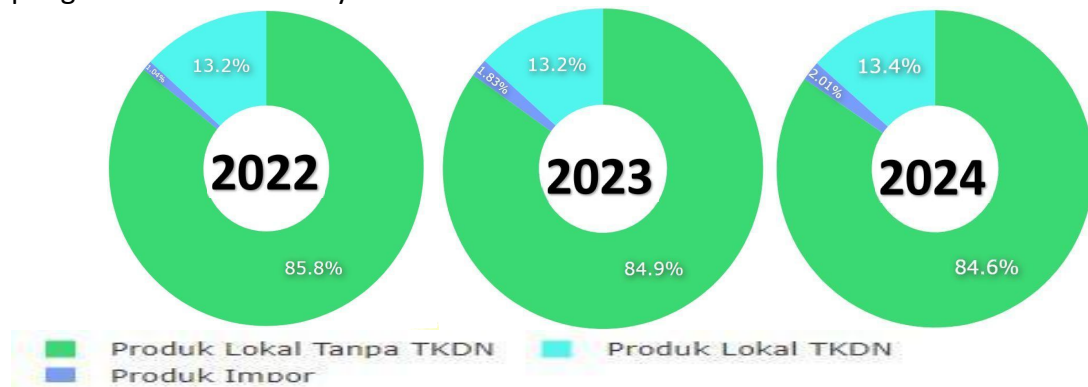
No. Pelanggaran	Penyedia	Jenis Pelanggaran	Masa Berlaku	Pengelola	Deskripsi
1953	PT. FARID MITRA UTAMA	Surat Peringatan 1	15 Februari 2024 -	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik Tahun 2023 bahwa Pengelola Katalog Elektronik Nasional telah melakukan penurunan pencantuman produk/penonaktifan produk pada sistem e-purchasing dikarenakan terdapat temuan diantaranya: Substitusi Produk Impor/ Ketidaksesuaian Informasi TKDN dan/atau Ketidaksesuaian Kategori, sehingga memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 maka penyedia dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan Pertama.

Gambar 3.1 : Pelaku usaha dengan Riwayat pelanggaran

Sumber : Katalog elektronik lokal DKI Jakarta

Selain itu, peneliti juga menemukan dalam pemaketan pekerjaan, personil BPPBJ mampu mencatatkan pencapaian target lebih dari 90%, akan tetapi peneliti juga menemukan bahwa produk impor yang beredar di platform E-Catalogue DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tentunya tak sejalan dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, program P3DN serta tujuan BPPBJ DKI Jakarta yaitu untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini tentunya cepat atau lambat

apabila tidak dibenahi akan membawa dampak buruk bagi UMKM dan para pengusaha lokal khususnya di Jakarta.



Gambar 3.2 : Realisasi P3DN pada E-Catalogue lokal DKI Jakarta 2022 - 2024
 Sumber : BPPBJ DKI Jakarta 2024

3.1.2 Faktor Tim

Selain Faktor personal yang menyangkut individu setiap anggota organisasi, Faktor tim juga sangat memengaruhi kinerja suatu organisasi karena sejatinya organisasi adalah sebuah tim yang terbentuk untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu komposisi tim akan memberi dampak yang cukup signifikan bagi kinerja organisasi. Menurut Armstrong & Baron dalam Wibowo (2014 : 7) dalam suatu organisasi dibutuhkan pembagian kelompok - kelompok kerja sesuai keahlian dan kebutuhan serta memiliki komposisi yang berimbang sama demi mewujudkan kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Akan tetapi, peneliti menemukan komposisi eksisting tenaga pengelola PBJ masih tidak proporsional. Terdapat kekurangan tenaga dalam setiap pokja dimana rata - rata hanya tersedia 4 orang per pokja dimana idealnya dalam 1 pokja terdapat 7 orang yang mewakili semua bidang terkait pengadaan. Akibatnya banyak tenaga PBJ yang merangkap menjadi anggota beberapa pokja sekaligus.

Tabel 3.1
 Komposisi eksisting PBJ BPPBJ 2024

	JABATAN	UPPBJ JAKART A PUSAT	UPPBJ JAKART A BARAT	UPPBJ JAKART A TIMUR	UPPBJ JAKART A SELATAN	UPPBJ JAKART A UTARA DAN KEP. SERIBU	UPPBJ BALAIKOTA	TOTAL
1	Fungsional Madya	1	3	2	2	1	4	13
2	Fungsional Muda	7	6	8	5	9	19	54
3	Fungsional Pertama	3	2	3	1	2	5	16
4	Pelaksana	2	2	4	3	4	10	25

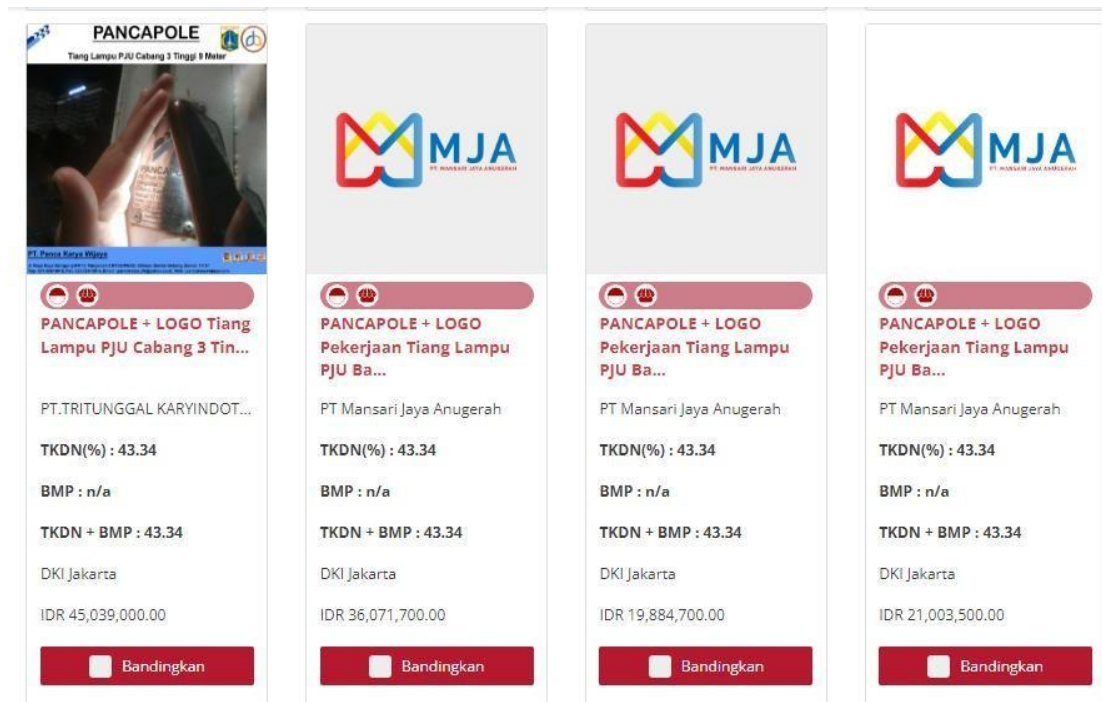
5	PPPK Fungsional Ahli Pertama	0	1	0	0	0	1	2
TOTAL PERSONEL POKJA		13	14	17	11	16	39	110
TOTAL POKJA		3	2	3	3	4	11	26

Sumber : BPPBJ DKI Jakarta 2024

Hal ini tentunya akan sangat mengganggu kinerja BPPBJ secara keseluruhan karena hal ini menyebabkan personil dan tim memiliki tanggung jawab dan beban kerja yang lebih besar dari yang seharusnya. Hal ini tentu berpotensi mengakibatkan kendala dalam pekerjaan pengadaan, pengelolaan katalog elektronik, dll.

3.1.3 Faktor Sistem Kerja Organisasi

Dalam pengelolaan katalog elektronik lokal DKI Jakarta, menurut Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022, pada bab IV, BPPBJ melakukan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dimana dalam penyusunan katalog, BPPBJ berwenang untuk membuka etalase produk, serta menindaklanjuti pelaku usaha yang terduga maupun terbukti melakukan pelanggaran. Akan tetapi dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menemukan bahwa terdapat kekurangan pada sistem *E-purchasing* berbasis *E-Catalogue* yang dikelola BPPBJ dimana pelaku usaha dapat mendaftarkan produknya tanpa mencantumkan informasi lengkap terkait komoditas yang dijualnya. Hal ini tentunya menunjukkan kelemahan sistem katalog elektronik yang ada dimana kelengkapan informasi ternyata dapat ditolerir. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama apabila PPK berniat membuat surat pesanan dan bukan tidak mungkin spesifikasi barang tersebut dapat “dimainkan” oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak tertulis secara rinci pada laman produk.



Gambar 3.3 : Contoh Produk di E-Catalogue yang tercantum tanpa informasi lengkap (minus foto)

Sumber : Katalog elektronik lokal DKI Jakarta, 2024

Selain informasi gambaran produk, terdapat pula produk terdaftar tanpa rincian spesifikasi teknis yang lengkap. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru dimana instansi pemerintah akan sulit mengukur nilai manfaat suatu barang/jasa yang akan dibeli melalui proses pengadaan. Spesifikasi teknis yang lengkap tercantum seharusnya sudah menjadi syarat wajib yang dipenuhi oleh pelaku usaha dalam pencantuman produk dalam katalog elektronik. Selain merupakan etika dasar dalam kegiatan usaha, hal ini tentunya juga akan membantu Instansi pemerintah selaku calon pembeli menilai apakah barang/jasa tersebut mampu memenuhi kebutuhan Instansi yang bersangkutan dinilai dari *Value for money*.



EXCAVATOR AI-80SHL

4442600001-ABD-199864916

PT. Amphibious Indonesia Wijaya

Katalog Lokal

Alat Berat dan Alat Pengendali Banjir

Rp 1.660.000.000,00

Wilayah DKI Jakarta

Stok Produk : 4

Pilih Lokasi untuk melihat Harga

DKI Jakarta

Nomor KBLI	4442600001
Spesifikasi Dimensi Hull	Tidak Menggunakan
Material Hull	Tidak Menggunakan
Transom Extension	Tidak Menggunakan
Tipe Mesin Utama	Yanmar 4TNV498-Z
Jenis Bahan Bakar dan Kapasitas Tangki	Solar/Diesel : 120 L
Faktor Emisi Lokal	Tidak Menggunakan
Mesin Bantu (Genset)	Tidak Menggunakan
Sistem Konektor Tongkang	Tidak Menggunakan
Sistem Pendinginan Kabin	Air Conditioning

Gambar 3.4 : Contoh produk tercantum tanpa spesifikasi teknis lengkap

Sumber : Katalog elektronik lokal DKI Jakarta

3.2 Faktor Penghambat

Dalam mengelola katalog elektronik DKI Jakarta, BPPBJ DKI Jakarta mengalami beberapa kendala yang menghambat kinerja organisasi, antara lain Komitmen Kerja Personel BPPBJ DKI Jakarta Yang Masih kurang, Kurangnya Personil Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Lemahnya Kontrol sistem terhadap Pelaku Usaha yang menjadi penyedia di Jendela Katalog elektronik. Hal - hal ini tentunya memerlukan pembenahan secara cepat, tepat dan terukur untuk memastikan hal - hal seperti ini tak ditemui lagi di kemudian hari, apalagi sektor pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu pilar utama berjalannya pemerintahan.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Dalam mengatasi hambatan - hambatan yang ditemui, BPPBJ DKI Jakarta sudah melakukan beberapa langkah, antara lain mewajibkan pembuatan laporan

kinerja dan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap serta dengan mendampingi personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menerapkan sanksi bagi personel yang dinilai sudah tak berkomitmen dalam pekerjaan, Memaksimalkan penyerapan tenaga terutama dari CPNS untuk pengelola PBJ Pertama dan dengan mempermudah persyaratan administrasi untuk formasi JF PPBJ yang dalam hal ini BPPBJ Berkoordinasi dengan BKD dan BPSDM, Memperkuat kontrol terhadap pelaku usaha dengan memperketat seleksi pelaku usaha yang ingin mendaftar menjadi penyedia pada *platform* katalog elektronik serta memperbarui sistem pembayaran pada katalog elektronik yang mampu menjamin keamanan *cashflow* baik bagi pelaku usaha maupun Instansi pemerintah yang membeli. Melakukan update sistem *E-Catalogue* dimana pelaku usaha wajib mencantumkan spesifikasi barang secara lengkap serta menginput TKDN dan BMP saat menayangkan produk di *platform E-Catalogue* lokal DKI Jakarta.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan *E-Catalogue* di Provinsi DKI Jakarta sejauh ini cukup baik, namun masih memerlukan pembenahan, terutama pada sistem pendaftaran pelaku usaha dan pencantuman produk, kinerja para personil yang bekerja di BPPBJ DKI Jakarta juga memerlukan pembenahan dan peningkatan supaya tak ada lagi pelaku usaha yang bermasalah atau tidak berkompeten menjadi penyedia di katalog elektronik maupun menjadi vendor penyedia barang/jasa pemerintah. Proses pengelolaan etalase produk dalam katalog elektronik sendiri memakan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 55 hari kerja.

Berbeda dengan penelitian - penelitian terdahulu yang telah dirujuk dalam subbab 1.3 diatas dimana penelitian - penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pemanfaatan *E-Catalogue* untuk proses pengadaan barang/jasa. baik oleh pelaku usaha maupun Instansi pemerintah dan BUMN selaku konsumen. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan katalog elektronik oleh BPPBJ sebelum bisa dipergunakan, selama dipergunakan maupun setelah digunakan yaitu dalam proses pengendalian kontrak pengadaan dimana ini mencakup pembukaan etalase produk, pendaftaran pelaku usaha calon penyedia, pencantuman produk, program percepatan/peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberian sanksi pada pelanggar ketentuan seperti penonaktifan produk, penonaktifan akun pelaku usaha hingga pemberlakuan daftar hitam. Hal - hal ini tentunya juga merupakan sesuatu yang selaras dengan tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

BPPBJ DKI Jakarta mencatatkan progres pengelolaan *E-Catalogue* yang cukup baik dengan 164.745 item produk beredar dalam platform *E-Catalogue* yang dijual oleh 5069 penyedia dan terbagi kedalam 53 etalase produk. Akan tetapi dibalik catatan impresif tersebut, banyak terdapat kekurangan dimana terdapat pelaku usaha yang memiliki riwayat pelanggaran akan tetapi masih bisa mendaftar sebagai penyedia, masih terdapat produk yang tak lengkap spesifikasi teknisnya, adanya ketidaksesuaian antara KBLI pelaku usaha dengan produk yang dijual serta sistem pembayaran yang bertentangan dengan kebijakan kebanyakan perusahaan. Selain itu terdapat 1579 pelaku usaha yang masuk dalam list pelanggar ketentuan dan dinonaktifkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan harus sesegera mungkin dilakukan oleh BPPBJ DKI Jakarta selaku pengelola katalog elektronik lokal supaya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Jakarta melalui *E-Purchasing* semakin minim bahkan tanpa permasalahan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Kinerja BPPBJ dalam Pengelolaan *E-Catalogue* di Provinsi DKI Jakarta belum bisa dikatakan baik. Hal ini terlihat dari berbagai keadaan di lapangan yang ditemukan peneliti dan menjadi poin minus sepertirendahnya komitmen personil, kompetensi personil yang masih kurang, serta sistem kerja organisasi yang tidak cukup baik dan membuka banyak celah bagi pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kecurangan. BPPBJ DKI Jakarta perlu melakukan pembenahan baik pada sistem pengelolaan katalog elektronik lokal maupun pada kinerja dan kompetensi personil dan tim pengelola katalog.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dikarenakan proses penelitian hanya berlangsung 2 (dua) minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) : Penulis menyadari bahwa masih adanya temuan dari hasil penelitian mengenai Kinerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan E-Catalogue di Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu peneliti menyarankan adanya penelitian lebih lanjut serta pengambilan langkah teknis dengan segera untuk mengatasi kekurangan dan celah - celah yang ada yang bisa dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunianya. Terima Kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik setiap harinya bagi penulis. Terima kasih kepada bapak Dra.Hj. Riza Risyanti,M.Si selaku dosen pembimbing atas segala dukungan,bimbingan,arahan dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi. Terima kasih juga kepada Bapak Dr.Drs. Sampara Lukman,MA dan Ibu Selvi Diana Meilinda, MPA atas bantuan pemikirannya dalam menganalisis temuan menarik yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat menjadi kebaruan untuk penelitian lanjutan kedepannya. Serta ucapan terimakasih kepada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta yang sudah bersedia menjadi tempat penelitian bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Haidir dan Budi Ilham Maliki (2024) "Penerapan Kebijakan *E-Purchasing* dan Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA" Jurnal Pengadaan Barang/Jasa(JPBJ)ISSN:2828-9153'Vol.3
<https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/47/35>
- Agus Arif Rakhman (2023) "Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) PerencanaanPengadaanBarang/Jasa"JurnalPengadaanBarang/Jasa(JPBJ)ISSN: 2828-9153Vol 2 47-63
<https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/36/26>
- Ali Zakariya dkk (2024) "Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui e-Purchasing" Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)ISSN:2828-9153 Vol 3 No.1 9-18
<https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/46/33>
- Andryani Ningsih dkk (2015) "Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat" Jurnal Manajemen danPelayanan Farmasi Vol 5 No.4 241-248

- Asep Indra Gumilar dkk (2023) “Analisis Dukungan Anggaran Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*ISSN:2828-9153Vol.2No.2,260-64
<https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/38/27>
- Darmawan dkk (2023) “Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara, Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia” *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*ISSN:2828-9153 Vol 2 No.2 94- 107
<https://journal.ifpi.or.id/index.php/jpbj/article/view/43/31>
- Deby Ariesta (2021) “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui *E- Catalogue* Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”*ASCARYA* Vol. 1 No. 2: Islamic Science, Culture, and Social Studies (2021) 156- 172
- Fernandes Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : ALFABETA
- Fitri Diani dan Fauzi Arif Lubis (2022) “Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8
- Lexy J. Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA
- Muhammad Iqbal (2020) “Pengaruh Pelaksanaan *e-Catalogue* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm” *Jurnal USM Law Review* Vol 3 No 1 77-97
- Nurlia (2017)“Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pt. Pln (Persero)Area Makassar Utara ”
<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/3920>
- Sigit Hermawan. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang : Media Nusa Creative
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada